



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA



RENCANA STRATEGIS 2025-2029



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS 2025-2029



BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN PAPUA II

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II, Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2025–2029 dapat diselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai penjenjangan dari Rencana Strategis di masing-masing Unit Organisasi yang merupakan penurunan dari Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman. Selanjutnya, Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II disusun dengan memuat arah kebijakan dan strategi pelaksanaan tugas selama periode lima tahun ke depan, selaras dengan penyelenggaraan bidang perumahan dan kawasan permukiman.

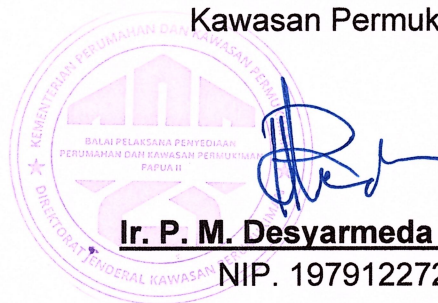
Rencana Strategis ini disusun sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi penyelenggaraan pemerintahan di bidang penyediaan perumahan. Dokumen Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Tahun 2025–2029 memuat pendahuluan yang mencakup kondisi umum dan potensi permasalahan, tujuan dan sasaran program unit organisasi, arah kebijakan dan strategi, kerangka regulasi, kerangka kelembagaan, target kinerja, serta kerangka pendanaan dalam rangka penyelenggaraan program penyediaan hunian yang layak.

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II ini diharapkan dapat menjadi kerangka acuan dan pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan perumahan yang bersifat multisektor serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan daerah, sektor swasta, maupun masyarakat.

Akhir kata, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kerja sama dalam penyusunan Rencana Strategis ini. Besar harapan kami agar seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dapat dicapai secara optimal, sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan visi *“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”*.

Manokwari, 31 Desember 2025

Kepala Balai
Pelaksana Penyediaan Perumahan dan
Kawasan Permukiman Papua II



Ir. P. M. Desyarmeda Killian, S.T., M.Si.

NIP. 197912272006052001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Kondisi Umum.....	1
I.2 Potensi dan Permasalahan.....	9
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	12
II.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	12
II.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.....	13
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN.....	15
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi.....	17
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II.....	24
III.3 Kerangka Kelembagaan	27
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	32
IV.1 Target Kinerja.....	32
IV.2 Kerangka Pendanaan	33
BAB V PENUTUP.....	35
LAMPIRAN	37

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Sebaran Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	3
Gambar 2. Analisis SWOT.....	11
Gambar 3. Sasaran Kegiatan BP3KP Papua II Tahun 2025-2029.....	15
Gambar 4. Sasaran Kegiatan BP3KP Papua II Tahun 2025-2029	16
Gambar 5. Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP	27
Gambar 6. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025.....	29
Gambar 7. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian	29

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.....	2
Tabel 2. Data RTLH dan <i>Backlog</i> Perumahan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.....	5
Tabel 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2020-2024	Error! Bookmark not defined.
Tabel 4. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN	29
Tabel 5. Jumlah Pegawai BP3KP Papua II Berdasarkan Satuan Kerja dan Pendidikan.....	30
Tabel 6. Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Jabatan pada BP3KP Papua II	30
Tabel 7. Target Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025–2029	33
Tabel 8. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Papua II	34

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Perumahan merupakan hak dasar setiap warga negara Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28H ayat (1), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, serta memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat. Oleh karena itu, pemerintah memiliki peran strategis dalam menjamin terpenuhinya hak tersebut melalui penyediaan akses hunian yang layak dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Rumah tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang penting dalam membentuk kehidupan masyarakat yang bermartabat, aman, damai, dan nyaman, serta mendukung peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Undang-undang ini menegaskan bahwa pembangunan perumahan bertujuan menjamin setiap warga negara dapat menghuni rumah yang layak dan terjangkau dalam lingkungan yang sehat, aman, terorganisasi, terintegrasi, dan berkelanjutan. Sejalan dengan peraturan tersebut, Pemerintah melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029 menetapkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman sebagai salah satu prioritas nasional yang diarahkan untuk memperkuat pelayanan dasar, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pemerataan Pembangunan antarwilayah.

Dalam rangka mewujudkan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan, diperlukan penerapan prinsip pembangunan yang seimbang antara aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta didukung oleh penguatan dimensi kelembagaan. Penerapan prinsip tersebut bertujuan untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Selain itu, pengarusutamaan gender merupakan strategi penting untuk menjamin terpenuhinya hak dan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan masyarakat berpenghasilan rendah, agar memperoleh akses, partisipasi, dan manfaat yang setara dalam pembangunan perumahan dan kawasan

permukiman. Dalam konteks tersebut, pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terus melakukan berbagai upaya strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap perumahan dengan menetapkan **Program Tiga Juta Rumah** sebagai program prioritas nasional yang menekankan percepatan penyediaan hunian layak dan terjangkau secara merata.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II merupakan bagian dari reformasi birokrasi dan penataan organisasi pemerintahan dari unit sebelumnya, yaitu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Papua II (BP2P Papua II) yang berada di bawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Transformasi ini dimaksudkan untuk memperkuat fokus pembangunan sektor perumahan dan kawasan permukiman secara lebih terintegrasi dan berkelanjutan serta meningkatkan efektivitas penyelenggaraan program penyediaan rumah layak huni, peningkatan kualitas perumahan, serta penataan kawasan permukiman, sehingga mampu menjawab tantangan *backlog* perumahan, keterjangkauan bagi masyarakat berpenghasilan rendah, serta kebutuhan penataan lingkungan hunian yang lebih tertata dan inklusif di daerah.

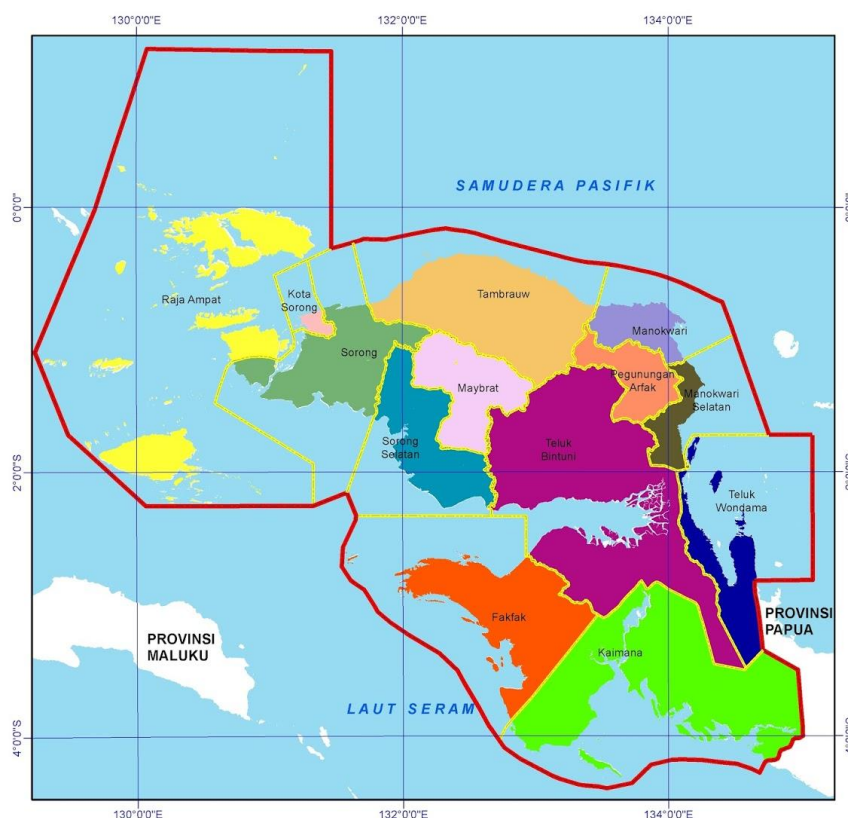
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, BP3KP Papua II memiliki wilayah kerja yang mencakup Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya dengan total luas wilayah mencapai 99.398,28 km². Cakupan wilayah kerja tersebut mencerminkan karakteristik geografis yang beragam, meliputi wilayah kepulauan, pesisir, hingga pegunungan. Kondisi ini menuntut penerapan pendekatan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang adaptif, kontekstual, serta mampu menyesuaikan dengan dinamika dan tantangan geografis setempat.

Tabel 1. Luas Wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)
Provinsi Papua Barat		
1	Kab. Manokwari	2.763,02
2	Kab. Fak Fak	9.736,55
3	Kab. Teluk Bintuni	19.943,29
4	Kab. Teluk Wondama	4.847,34
5	Kab. Kaimana	17.849,22
6	Kab. Manokwari Selatan	1.837,10
7	Kab. Pegunungan Arfak	3.298,91
Total (A)		60.275,33

No	Kabupaten/Kota	Luas Wilayah (Km ²)
Provinsi Papua Barat Daya		
1	Kota Sorong	205,26
2	Kab. Raja Ampat	7.442,31
3	Kab. Sorong	7.564,65
4	Kab. Maybrat	6.570,23
5	Kab. Sorong Selatan	5.385,68
6	Kab. Tambrau	11.954,82
Total (B)		39.122,95
TOTAL (A+B)		99.398,28

Sumber : BPS, 2026



Gambar 1. Peta Sebaran Wilayah Kerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Secara geografis, Papua Barat dan Papua Barat Daya didominasi oleh kawasan pesisir dan kepulauan, hutan tropis, serta bentang alam pegunungan dan perbukitan yang tersebar hingga ke wilayah pedalaman. Sebagian wilayah memiliki garis pantai yang panjang dan berhadapan langsung dengan perairan Samudra Pasifik dan Laut Seram, sementara wilayah lainnya berada pada kawasan bergunung dan berlereng curam yang rentan terhadap bencana longsor dan banjir. Selain itu, kondisi tektonik

yang aktif menjadikan beberapa wilayah memiliki potensi risiko gempa bumi. Karakteristik geografis tersebut menyebabkan pola permukiman masyarakat tersebar dengan tingkat aksesibilitas antarwilayah yang relatif terbatas. Oleh karena itu, penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan pendekatan yang adaptif, berbasis mitigasi risiko bencana, serta memperhatikan aspek keberlanjutan lingkungan dan kearifan lokal.

Masyarakat di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya terdiri atas beragam suku asli Papua, antara lain Arfak, Biak, Moi, Maybrat, serta suku-suku pesisir lainnya yang memiliki struktur adat, hak ulayat, dan ikatan kekerabatan yang kuat. Pola permukiman umumnya mengikuti struktur marga atau kampung adat dan tersebar di wilayah pesisir, lembah, maupun perbukitan sesuai dengan wilayah hak ulayat masing-masing. Dalam praktiknya, satu unit rumah kerap dihuni oleh lebih dari satu kepala keluarga atau keluarga besar secara bersama-sama, sehingga tingkat kepadatan hunian relatif tinggi dan kebutuhan ruang serta prasarana dasar menjadi lebih besar. Masyarakat pada umumnya terbuka terhadap pembangunan, namun tetap menjunjung tinggi musyawarah adat dan persetujuan komunitas dalam pemanfaatan lahan. Oleh karena itu, pelaksanaan program perumahan dan penataan kawasan permukiman perlu mengedepankan pendekatan partisipatif, penghormatan terhadap kearifan lokal, serta pelibatan aktif masyarakat dalam kegiatan peningkatan kualitas rumah, penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta penanganan kawasan permukiman berbasis komunitas.

Selain itu, beberapa wilayah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya menghadapi tantangan keamanan yang berdampak pada pelaksanaan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Kondisi tersebut memengaruhi aksesibilitas lokasi, mobilisasi tenaga kerja dan material, serta berpotensi menimbulkan perpindahan masyarakat. Dengan demikian, diperlukan perencanaan yang adaptif, koordinasi lintas sektor yang intensif, serta pendekatan sosial yang tepat agar pelaksanaan program perumahan tetap berjalan efektif dan tepat sasaran.

Adapun kondisi *backlog* perumahan di kedua provinsi tersebut masih menjadi tantangan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. *Backlog* terjadi baik dalam bentuk *housing ownership backlog* (kekurangan kepemilikan rumah) maupun *housing quality backlog* (ketidaklayakan hunian). Kondisi ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah kepala keluarga baru, keterbatasan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah, pola hunian keluarga

besar dalam satu rumah, serta keterbatasan akses terhadap infrastruktur dasar di wilayah terpencil dan kepulauan. Di samping itu, tingginya biaya konstruksi akibat kendala distribusi material dan kondisi geografis turut memperlambat pemenuhan kebutuhan rumah layak huni. Oleh karena itu, diperlukan intervensi program pembangunan dan peningkatan kualitas rumah yang terencana, terintegrasi, dan berkelanjutan. Berikut disajikan data Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan *backlog* perumahan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Tabel 2. Data RTLH dan *Backlog* Perumahan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya

Tahun 2025

No	Kabupaten/Kota	<i>Backlog</i> Kepemilikan	<i>Backlog</i> Kualitas	Total <i>Backlog</i> Perumahan
Data <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Papua Barat				
1	Kab. Manokwari	5.516	6.653	12.169
2	Kab. Fak Fak	3.949	5.165	9.114
3	Kab. Teluk Bintuni	2.137	3.210	5.347
4	Kab. Teluk Wondama	1.172	3.658	4.830
5	Kab. Kaimana	1.240	2.645	3.885
6	Kab. Manokwari Selatan	660	1.921	2.581
7	Kab. Pegunungan Arfak	232	1.632	1.864
Total (A)		14.906	24.884	39.790
Data <i>Backlog</i> Perumahan Provinsi Papua Barat Daya				
1	Kota Sorong	7.273	6.349	13.622
2	Kab. Raja Ampat	2.480	5.021	7.501
3	Kab. Sorong	3.050	4.022	7.072
4	Kab. Maybrat	801	3.803	4.604
5	Kab. Sorong Selatan	1.215	3.034	4.249
6	Kab. Tambrau	253	1.525	1.778
Total (B)		15.072	23.754	38.826
TOTAL (A+B)		29.978	48.638	78.616

Sumber : Website MyPKP, 2025

Dengan memperhatikan karakteristik geografis, sosial budaya, serta dinamika keamanan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, kondisi tersebut menjadi dasar bagi BP3KP Papua II dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan tepat sasaran. Perencanaan dimaksud diarahkan agar adaptif terhadap karakteristik wilayah, berkelanjutan, serta tetap memperhatikan aspek mitigasi bencana, penghormatan terhadap kearifan lokal, dan kebutuhan riil masyarakat.

Dalam beberapa tahun terakhir, capaian kinerja BP3KP Papua II pada Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan hasil yang sangat baik, yang tercermin dari terpenuhinya seluruh target indikator kinerja yang telah ditetapkan. Berbagai kegiatan, antara lain Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan dan pemeliharaan rumah susun, bantuan Prasarana, Sarana, dan Utilitas (PSU) bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), serta dukungan manajemen dan tata kelola organisasi, telah direalisasikan secara optimal. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi yang intensif dengan para pemangku kepentingan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan, serta komitmen terhadap prinsip transparansi, integritas, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.

Tabel 3. Perbandingan Capaian Kinerja dengan Target Kinerja Renstra BP3KP Papua II Tahun 2020 – 2024

No	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2020-2024														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Penyediaan Akses Perumahan yang Layak dan Aman																	
1	Jumlah Laporan Penyusunan Perencanaan Penyediaan Perumahan	Laporan	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	4	100%	4	2	50%
2	Jumlah Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Unit	5.510	5.510	100%	3.000	2.520	84%	4.500	1.337	30%	4.700	1.425	30%	5.000	1.062	21%
3	Jumlah Fasilitas pengembangan & Peningkatan Kualitas Sarana Hunian Pendukung Kawasan Pariwisata	Unit	-	-	-	140	90	64%	150	-	-	150	-	-	150	-	-
4	Jumlah Rumah Susun yang dibangun	Unit	88	-	-	182	152	84%	226	102	45%	260	43	17%	308	53	17%
5	Jumlah Rumah Susun yang dipelihara	Unit	80	-	-	44	-	-	58	1	2%	84	3	4%	88	3	3%
6	Jumlah Rumah Khusus yang dibangun	Unit	74	74	100%	111	82	74%	250	30	12%	300	-	-	350	-	-
7	Jumlah Rumah Khusus yang dipelihara	Unit	-	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-	50	-	-
8	Jumlah MBR yang mendapat fasilitas layanan bantuan PSU	Unit	-	-	-	300	50	17%	400	50	13%	500	244	49%	600	205	34%
9	Jumlah Laporan Pembinaan dan Pengembangan Kepatuhan Intern dan Manajemen Risiko	Laporan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	3	-

No	Sasaran Kegiatan	Satuan	Target Renstra 2020-2024														
			2020			2021			2022			2023			2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan																	
1	Jumlah Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
2	Jumlah Layanan Dukungan Manajemen Satker	Layanan	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%
3	Jumlah Layanan Perkantoran	Layanan	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%	2	2	100%

I.2 Potensi dan Permasalahan

A. Potensi

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya memiliki sejumlah potensi yang dapat dikembangkan, antara lain:

- a. Kearifan lokal masyarakat, khususnya pola hunian komunal dengan rumah yang relatif luas dan sederhana, merupakan potensi dalam pengembangan konsep perumahan berbasis budaya lokal dan pemberdayaan masyarakat;
- b. Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat menciptakan kebutuhan perumahan jangka menengah dan panjang yang dapat menjadi pendorong pengembangan sektor perumahan dan kawasan permukiman;
- c. Dukungan kebijakan nasional di bidang perumahan, khususnya bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), menjadi peluang bagi daerah untuk mengakselerasi penyediaan hunian layak;
- d. Ketersediaan lahan masih relatif luas dan berpotensi dikembangkan melalui perencanaan kawasan yang terintegrasi; dan
- e. Keberadaan BUMN sektor perumahan dan pembiayaan, seperti Perumnas, Bank Tabungan Negara (BTN), dan Sarana Multigriya Finansial (SMF), merupakan potensi strategis dalam mendukung pembangunan dan pembiayaan perumahan MBR.

B. Permasalahan

Di sisi lain, masih terdapat berbagai permasalahan yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman, antara lain:

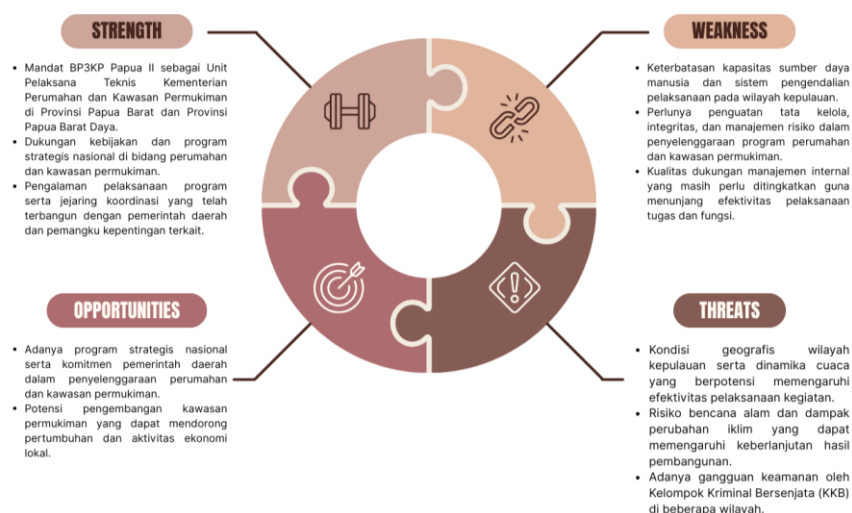
- a. Kesenjangan pemenuhan kebutuhan hunian layak bagi MBR masih cukup tinggi, ditandai dengan ketidakseimbangan antara kebutuhan dan ketersediaan rumah layak, rendahnya keterjangkauan daya beli MBR, keterbatasan akses pembiayaan perumahan, serta terbatasnya alokasi anggaran pembangunan perumahan dibandingkan dengan besarnya kebutuhan riil kabupaten/kota di wilayah Papua Barat dan Papua Barat Daya.
- b. Keterbatasan sistem penyediaan perumahan yang efisien dan terjangkau, yang dipengaruhi oleh keterbatasan ketersediaan lahan terutama di kawasan perkotaan serta wilayah yang didominasi hak ulayat (hak adat), belum

- terintegrasinya prasarana, sarana, dan utilitas (PSU) perumahan, rendahnya efisiensi proses perizinan, serta tingginya biaya logistik dan harga material akibat kondisi geografis wilayah yang bergunung, terpencar, dan kepulauan.
- c. Belum optimalnya kapasitas dan peran pelaku pembangunan perumahan di daerah, khususnya pengembang lokal dan BUMN perumahan, yang belum sepenuhnya didukung oleh regulasi, insentif, dan skema kemitraan yang memadai, serta masih terbatasnya pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha sebagai mitra dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
 - d. Kelemahan tata kelola, perencanaan, dan kelembagaan pembangunan perumahan, yang tercermin dari keterbatasan data perumahan dan kawasan permukiman yang akurat dan terintegrasi sebagai dasar perencanaan dan penganggaran, belum optimalnya koordinasi dan sinergi program antara pemerintah pusat dan daerah, serta masih rendahnya pemanfaatan APBD dalam mendukung pembangunan perumahan dan kawasan permukiman.
 - e. Tantangan keberlanjutan kualitas permukiman dan stabilitas wilayah, berupa potensi penurunan kualitas hunian dan munculnya kawasan permukiman kumuh baru apabila pembangunan perumahan tidak dilaksanakan secara terencana dan terpadu, serta adanya faktor sosial dan keamanan daerah, termasuk gangguan keamanan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di beberapa wilayah, yang berpotensi menghambat pelaksanaan kegiatan pembangunan perumahan, meningkatkan risiko keterlambatan, dan menambah biaya pelaksanaan.

C. Analisis SWOT

Potensi dan permasalahan di atas menunjukkan bahwa penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya menghadapi dinamika internal maupun eksternal yang perlu dikelola secara strategis dan terintegrasi. Oleh karena itu, dilakukan analisis SWOT melalui tahapan identifikasi faktor internal yang meliputi kekuatan dan kelemahan, serta faktor eksternal yang mencakup peluang dan ancaman, berdasarkan potensi dan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya.

ANALISIS SWOT



Gambar 2. Analisis SWOT

Hasil analisis SWOT tersebut kemudian disintesis untuk mengidentifikasi isu-isu strategis yang merepresentasikan tantangan utama yang perlu direspons oleh BP3KP Papua II dalam periode perencanaan 2025–2029. Berdasarkan hasil analisis dimaksud, dirumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

1. Tingginya kebutuhan pemenuhan hunian layak, yang tercermin dari backlog kepemilikan maupun backlog kualitas hunian yang masih signifikan di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya;
2. Masih diperlukannya penanganan permukiman kumuh secara terpadu, berkelanjutan, serta selaras dengan kebijakan nasional dan karakteristik wilayah di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya;
3. Perlunya penguatan tata kelola, integritas, serta sistem pengendalian risiko dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya; dan
4. Perlunya peningkatan kualitas dukungan manajemen internal BP3KP Papua II guna menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya.

Isu-isu strategis tersebut menjadi landasan dalam perumusan tujuan organisasi, sasaran program, serta arah kebijakan BP3KP Papua II untuk periode perencanaan 2025–2029.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

II.1 Tujuan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya di bawah Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman. Dalam rangka mewujudkan visi Presiden “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045” dan sejalan dengan tujuan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yaitu:

1. Peningkatan akses hunian layak, terjangkau, berkualitas, berkeadilan dan berkelanjutan; penanganan permukiman kumuh yang terpadu; serta tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas secara kolaboratif di Provinsi Papua Barat dan Papua Barat Daya dengan indikator tujuan sebagai berikut:
 - a. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pembangunan baru;
 - b. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas;
 - c. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas;
 - d. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui penyediaan unit hunian vertikal yang terpadu;
 - e. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas hunian vertikal;
 - f. Persentase peningkatan rumah layak huni melalui fasilitasi pembiayaan perumahan yang terjangkau;
 - g. Persentase luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 - h. Persentase terwujudnya tata kelola hunian publik, privat, dan perlindungan konsumen;
 - i. Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni; dan
 - j. Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan yang difasilitasi.

2. Peningkatan kualitas tata kelola pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II dengan indikator tujuan yaitu persentase peningkatan tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

II.2 Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

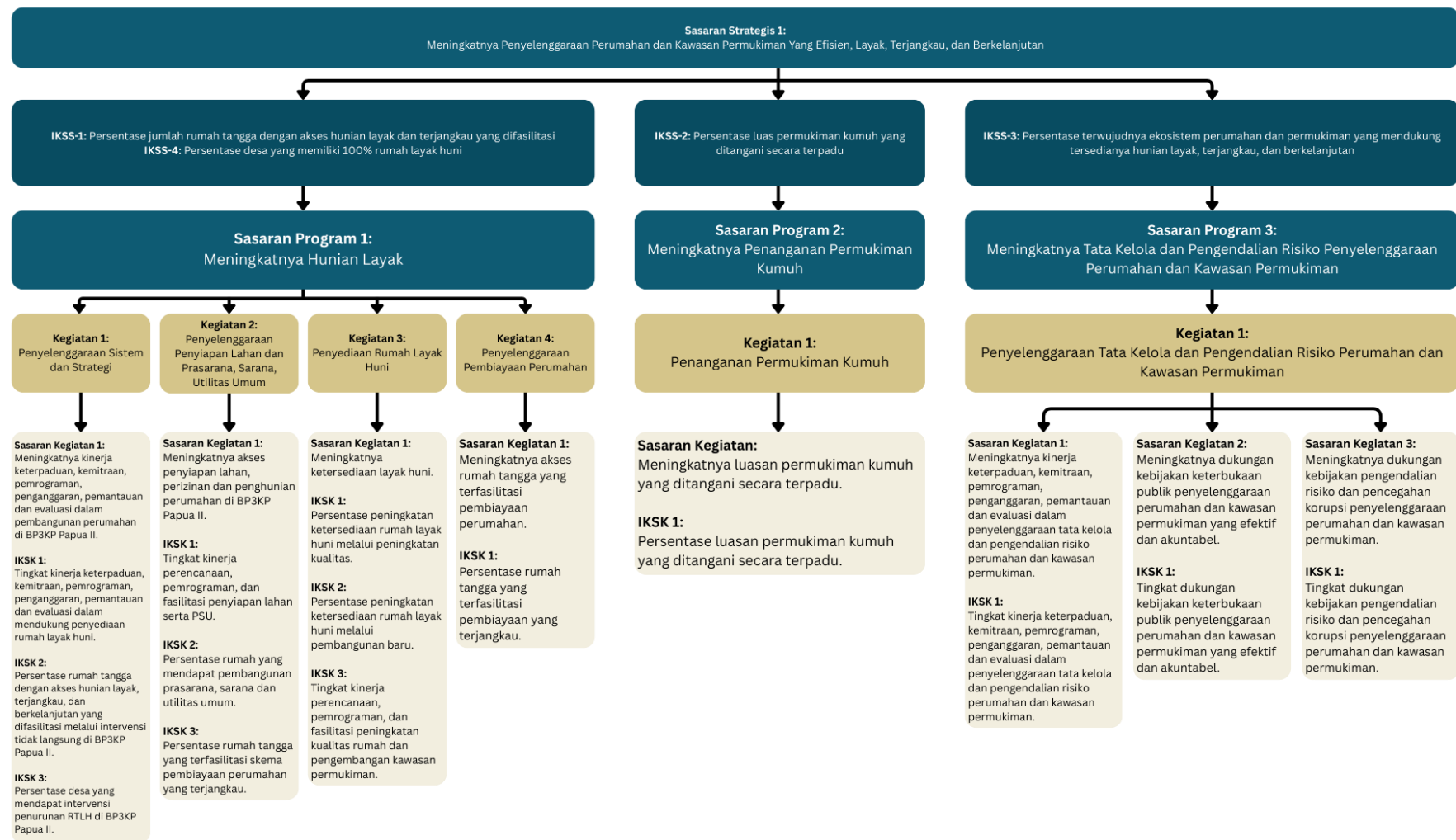
Sasaran program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II diarahkan untuk mendukung terwujudnya penyediaan perumahan yang layak, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat di wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya. Sasaran tersebut diwujudkan melalui peningkatan akses Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) terhadap hunian layak, antara lain melalui pelaksanaan Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), pembangunan rumah baru, serta penguatan kolaborasi dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, BP3KP Papua II berfokus pada penyediaan infrastruktur dasar perumahan dan kawasan permukiman melalui pembangunan dan peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan guna mendukung terwujudnya kawasan hunian yang aman, sehat, dan terpadu. Upaya tersebut juga diperkuat melalui pembangunan hunian vertikal serta pelaksanaan proyek strategis nasional, sehingga kebutuhan rumah layak huni dapat dipenuhi secara merata dan berkeadilan.

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, BP3KP Papua II menargetkan peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, serta pendampingan teknis kepada pemerintah daerah dan penerima manfaat program. Penguatan koordinasi lintas sektor menjadi fokus penting guna memastikan seluruh proses pembangunan perumahan dilaksanakan secara tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran. Melalui sasaran program tersebut, BP3KP Papua II berupaya mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendukung agenda pembangunan perumahan nasional. Adapun dua Sasaran Strategis (SS) Kementerian yang menjadi dasar pelaksanaan program BP3KP Papua II adalah sebagai berikut:

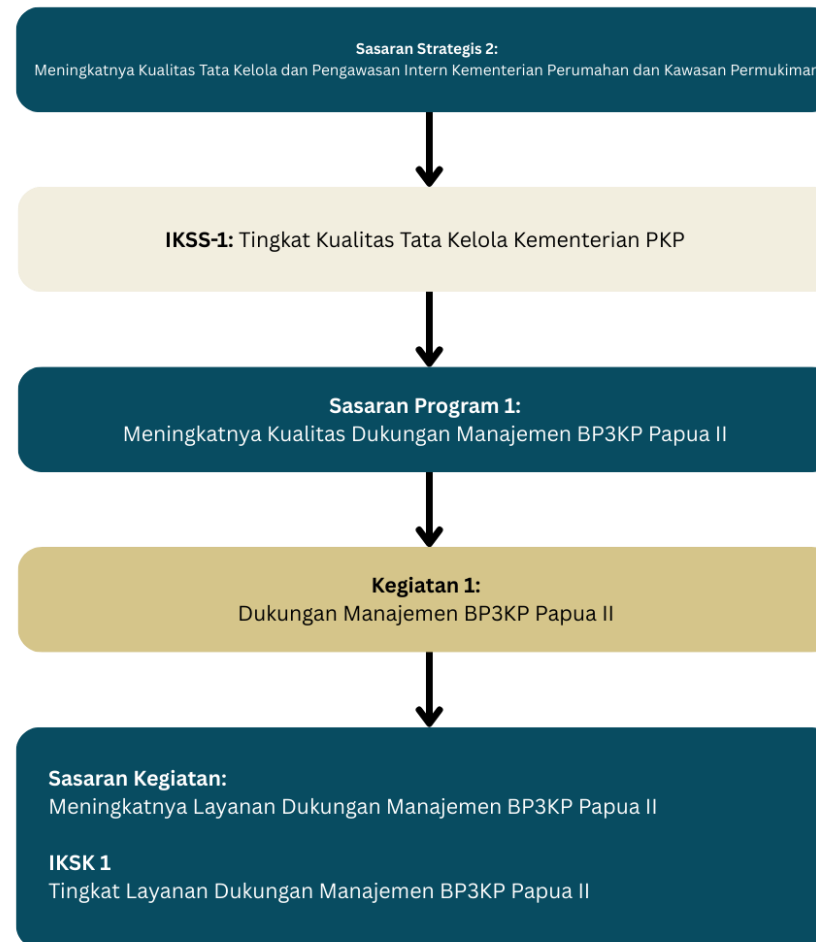
- a. Sasaran strategis (SS) 1, yaitu “Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Efisien, Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan”, dengan indikator kinerja SS sebagai berikut:

1. IKSS-1: Persentase rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi;
 2. IKSS 2: Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu;
 3. IKSS 3: Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan; dan
 4. IKSS 4: Persentase desa yang memiliki 100% (seratus persen) rumah layak huni.
- b. Sasaran strategis (SS) 2, yaitu “Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman”, dengan indikator kinerja sasaran strategis: IKSS 1- tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sasaran Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) merupakan penjabaran dari Sasaran Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang diselaraskan dengan tugas, fungsi, serta kewenangan Balai dalam mendukung pelaksanaan program dan kegiatan di wilayah kerja. Sasaran tersebut dituangkan dalam Sasaran Kegiatan dan Pohon Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II sebagai berikut:



Gambar 3. Sasaran Kegiatan BP3KP Papua II Tahun 2025-2029



Gambar 4. Sasaran Kegiatan BP3KP Papua II Tahun 2025-2029

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi

Arah Kebijakan dan Strategi Unit Organisasi di lingkungan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencakup Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Perumusan Arah Kebijakan dan Strategi tersebut dijabarkan sebagai berikut.

III.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi Sekretariat Jenderal

Sekretariat Jenderal berperan sentral dalam mendukung keberhasilan program dan kebijakan Kementerian PKP melalui penguatan kelembagaan, pengelolaan sumber daya, dan tata kelola internal. Arah kebijakan ke depan difokuskan pada:

- a. Penguatan Perencanaan dan Penganggaran, melalui strategi:
 - Penyusunan kebutuhan anggaran tahunan yang lebih rinci, berbasis data, dan mempertimbangkan pelaksanaan anggaran sebelumnya; dan
 - Integrasi antara perencanaan dan penganggaran serta peningkatan kualitas pemantauan dan evaluasi kegiatan.
- b. Transformasi Digital dan Tata Kelola, melalui strategi:
 - Transformasi digital dalam layanan administrasi, kepegawaian, pelayanan publik, pengelolaan data dan informasi, serta sistem pengadaan barang dan jasa; dan
 - Penyederhanaan proses birokrasi dan peningkatan efisiensi melalui sistem informasi terintegrasi.
- c. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), melalui strategi:
 - Pemetaan dan pemenuhan kebutuhan SDM berbasis Analisis Beban Kerja (ABK) dan kompetensi Pengembangan manajemen talenta Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui pelatihan, promosi berbasis merit, pemetaan karier, serta pembentukan balai kompetensi; dan
 - Peningkatan kapasitas SDM di seluruh bidang fungsional, termasuk keuangan, pengadaan, hukum, komunikasi, dan data.

- d. Penguatan Sistem Informasi dan Data, melalui strategi:
- Pengembangan sistem informasi sektoral terintegrasi berbasis Satu Data Indonesia; dan
 - Optimalisasi pemanfaatan data sebagai dasar kebijakan, perencanaan, dan evaluasi program secara berbasis bukti (*evidence-based policy*).
- e. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:
- Perbaikan kualitas layanan tata usaha pimpinan, pengelolaan kearsipan, protokoler, serta penyediaan sarana dan prasarana kantor; dan
 - Penguatan layanan keamanan, ketertiban, dan kehumasan secara profesional dan responsif.
- f. Percepatan Regulasi dan Advokasi Hukum, melalui strategi:
- Peningkatan kualitas pembentukan produk hukum, pembinaan SDM hukum, dan advokasi hukum yang responsif dan solutif; dan
 - Digitalisasi dan penguatan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- g. Modernisasi dan Optimalisasi Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara (BMN), melalui strategi:
- Pembinaan dan pendampingan intensif terhadap pengelolaan keuangan dan BMN; dan
 - Peningkatan akuntabilitas, pengamanan, dan optimalisasi pemanfaatan aset negara.
- h. Penguatan Sistem dan Tata Kelola Pengadaan Barang/Jasa, melalui strategi:
- Penguatan kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dan SDM pengadaan; dan
 - Integrasi perencanaan pengadaan dengan penganggaran serta pemanfaatan sistem *e-Procurement* untuk efisiensi dan transparansi.
- i. Penguatan Komunikasi Publik dan Pelayanan Publik, melalui strategi:
- Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) komunikasi publik, penguatan pelayanan berbasis Teknologi Informasi (TI), dan pengelolaan media digital secara terintegrasi; dan
 - Kolaborasi lintas K/L dan media untuk memperluas jangkauan informasi dan mitigasi disinformasi.
- j. Kolaborasi dan Pendanaan Alternatif, melalui strategi:
- Peningkatan sinergi dengan mitra dan pemangku kepentingan termasuk *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan sumber pendanaan Non-APBN; dan

- Perencanaan dan pengelolaan dana pinjaman serta program pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) secara terarah dan akuntabel.

III.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

Berikut merupakan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman.

- a. Meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak dan terjangkau melalui penyediaan serta peningkatan kualitas perumahan yang dapat dicapai dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan baru rumah susun, rumah khusus, dan rumah swadaya;
 - Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi;
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang aman dan terjangkau; dan
 - Penyediaan prasarana, sarana dan utilitas umum pada hunian tapak dan vertikal.
- b. Mempercepat penyediaan rumah layak huni melalui implementasi skema penyediaan perumahan yang inovatif dengan strategi:
 - Dukungan optimalisasi pemanfaatan skema pembiayaan alternatif seperti kredit mikro perumahan dan skema lainnya;
 - Pengembangan klinik perumahan untuk mendukung peningkatan kapasitas stakeholder perumahan dan masyarakat; dan
 - Dukungan pengembangan perumahan melalui pendekatan hunian berimbang.
- c. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu melalui strategi:
 - Pendampingan dan penguatan Pemerintah Daerah dalam menyusun kelengkapan instrumen perencanaan penyelenggaraan kawasan permukiman terpadu; dan
 - Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan infrastruktur kawasan permukiman (rumah, jalan, drainase, air minum, sanitasi, persampahan, dan proteksi kebakaran).
- d. Meningkatkan kualitas permukiman secara terpadu melalui strategi:
 - Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Peningkatan kolaborasi antar stakeholder dan penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;

- Peningkatan pendataan dan monitoring evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
- Memberikan pembinaan kepada pelaku usaha dan fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
- Pembinaan teknis bidang perumahan dan kawasan permukiman kepada pemangku kepentingan; dan
- Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material untuk mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi MBR.

III.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

Berikut merupakan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan.

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perdesaan melalui strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perdesaan
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perdesaan;
 - Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perdesaan;
 - Pengembangan model perumahan perdesaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum; dan
 - Fasilitasi penyediaan lahan untuk perumahan yang layak dan terjangkau tanpa mengurangi lahan produktif di wilayah perdesaan atau menimbulkan konflik agraria.
- b. Mendorong penyediaan rumah layak melalui skema pembiayaan perumahan inovatif melalui strategi:
 - Inisiasi kerjasama dengan lembaga keuangan mikro di wilayah perdesaan;
 - Pengembangan skema tabungan berencana;
 - Pengembangan bantuan tunai/in-kind yang terintegrasi dengan program pembangunan desa;
 - Pengembangan kerjasama dengan bumdes dalam penyediaan perumahan perdesaan;
 - Pengembangan kerjasama dengan koperasi sebagai wadah untuk masyarakat perdesaan dalam mengakses pembiayaan perumahan; dan
 - Peningkatan subsidi pembiayaan perumahan melalui Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP), Subsidi Selisih

Bunga (SSB) dan Subsidi Bantuan Uang Muka (SBUM) untuk MBR di wilayah perdesaan.

- c. Menyediakan sistem regulasi, pemanfaatan teknologi serta mengembangkan pola koordinasi melalui strategi:
- Penyusunan dan harmonisasi regulasi bidang perumahan dan kawasan permukiman perdesaan serta perumusan kebijakan dan strategi jangka panjang perumahan di wilayah perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian perumahan perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang penyusunan skema pembiayaan perumahan perdesaan;
 - Penyusunan NSPK di bidang pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - Penyusunan panduan pembinaan teknis dan supervisi penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - Penyusunan panduan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - Pengembangan diversifikasi model perumahan perdesaan yang sesuai dengan konteks lokal.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perdesaan melalui strategi:
- Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perdesaan;
 - Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perdesaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perdesaan;
 - Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perdesaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perdesaan; dan
 - Penguatan kelembagaan

III.1.4 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

Berikut merupakan Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan.

- a. Mempercepat penyediaan rumah layak huni di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Percepatan pembangunan rumah baru di wilayah perkotaan;
 - Perluasan cakupan peningkatan kualitas rumah di wilayah perkotaan;
 - Penyediaan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) perumahan di wilayah perkotaan; dan
 - Pengembangan model perumahan perkotaan yang terintegrasi dengan fasilitas sosial dan fasilitas umum.
- b. Optimalisasi Pemanfaatan Lahan Milik Negara/Daerah/BUMN, serta pengembangan perumahan vertikal melalui intensifikasi pemanfaatan lahan, termasuk penerapan konsep Kawasan Berorientasi Transit (*Transit Oriented Development/TOD*) dan pendekatan kawasan terpadu (*mixed-use development*).
- c. Pengembangan Perumahan Terintegrasi dengan Kawasan Strategis dan Sistem Transportasi Publik, melalui pengembangan kawasan perumahan berbasis Transit Oriented Development (TOD) serta pengembangan kawasan perkotaan baru yang berkelanjutan.
- d. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder dalam rangka mengembangkan perumahan dan kawasan permukiman di wilayah perkotaan, dengan strategi:
 - Peningkatan kolaborasi pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat serta stakeholder lainnya dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan;
 - Peningkatan kapasitas stakeholder dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman perkotaan di bidang penyiapan lahan, koordinasi perizinan, penyiapan penghunian dan penyusunan skema pembiayaan, pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan perkotaan;
 - Pelaksanaan harmonisasi perencanaan kawasan perkotaan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 - Pelaksanaan koordinasi antar stakeholder terkait penyelenggaraan perumahan perkotaan; dan
 - Penguatan kelembagaan.
- e. Penguatan perencanaan, koordinasi, dan integrasi program antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, dengan strategi pengembangan sistem informasi perumahan terintegrasi dan penyelarasan program perumahan antar level pemerintahan.
- f. Pengembangan skema pembiayaan perumahan berbasis kebutuhan MBR, dengan strategi inovasi pembiayaan mikro perumahan, kredit konstruksi swadaya, dan kolaborasi dengan lembaga keuangan non-bank.

- g. Penerapan teknologi konstruksi murah dan cepat serta penguatan sistem informasi perumahan dan permukiman berbasis digital, dengan strategi penggunaan teknologi rancang bangun rumah terkini, digitalisasi sistem monitoring, dan pemutakhiran basis data rumah Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.
- h. Percepatan penghunian, dengan strategi revitalisasi rusun, pelatihan pengelolaan rusun oleh penghuni, serta integrasi rusun dengan fasilitas sosial dan ekonomi.

III.1.5 Arah Kebijakan dan Strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko (TKPR) meliputi:

- a. Menjamin penangan dan pengawasan pelaksanaan bantuan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) serta memastikan ketepatan sasaran penerima manfaat, melalui penguatan tata kelola dan regulasi pelaksanaan bantuan pembangunan maupun peningkatan kualitas rumah, baik dalam bentuk intervensi langsung maupun subsidi. Upaya tersebut didukung oleh pemanfaatan data terintegrasi secara nasional guna meningkatkan akurasi sasaran penerima manfaat.
- b. Meningkatkan kualitas tata kelola hunian publik dan hunian vertikal, melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dalam pengelolaan dan pengawasan penyediaan serta pengelolaan hunian publik. Strategi ini diarahkan pada penyediaan hunian yang terjangkau, layak huni, dan berkelanjutan bagi masyarakat, dengan menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
- c. Mendorong diversifikasi sumber pembiayaan perumahan, melalui pengembangan dan perluasan skema pembiayaan di luar FLPP 100% KPR, peningkatan akurasi sasaran melalui integrasi data nasional, serta penguatan regulasi dan tata kelola pembiayaan perumahan, dengan strategi:
 - Diversifikasi pendanaan melalui implementasi skema Tapera sebagai alternatif pembiayaan, penguatan skema pinjaman/hibah multilateral, serta pengembangan Program Perumahan Hijau dan Terjangkau di Indonesia (*Indonesia Green Affordable Housing Program/IGAHP*).

- Penguatan koordinasi secara intensif dengan Bank Indonesia dan pemangku kepentingan terkait.
 - Optimalisasi pemanfaatan DTSEN dan sistem antrean perumahan.
 - Penyusunan dan penyempurnaan regulasi serta tata kelola melalui penyusunan petunjuk teknis, peraturan menteri, dan keputusan menteri guna mendukung efektivitas kebijakan.
- d. Penguatan regulasi mekanisme kemitraan dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, melalui penyusunan Surat Edaran Menteri mengenai mekanisme kemitraan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- e. Peningkatan kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, melalui penguatan regulasi mekanisme kemitraan serta perluasan kerja sama dengan *stakeholder* lain dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.
- f. Mewujudkan sektor perumahan yang inklusif dan berkelanjutan, melalui penguatan ekosistem perumahan dan perbaikan tata kelola secara menyeluruh, dengan strategi:
- *Governance*: penyusunan NSPK serta pemberian bimbingan teknis terkait tata kelola dan pengendalian risiko.
 - *Risk Management*: penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan penerapan e-Manajemen Risiko.
 - *Compliance*: pembangunan Zona Integritas, pengembangan sistem informasi pemantauan TKPR (e-Pantau), penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), serta penguatan fungsi pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
 - *Financing*: penguatan pembiayaan melalui kerja sama investasi, pengembangan sistem antrean perumahan, optimalisasi FLPP dan IGAHP, serta kerja sama luar negeri dan program *green affordable housing*.
 - Dukungan pembangunan rumah baru maupun renovasi melalui pemanfaatan CSR serta penyediaan dan penyiapan lahan.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Sejalan dengan kebijakan pembangunan di bidang perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana tertuang dalam RPJPN 2020–2024, RPJMN 2025–2029, Renstra Kementerian PKP 2025–2029, serta Renstra masing-masing Unit Organisasi (Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal

Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko), arah kebijakan dan strategi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman oleh Unit Pelaksana Teknis, dalam hal ini Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II, meliputi:

a. Peningkatan Layanan Dukungan Manajemen, melalui strategi:

- Peningkatan kualitas layanan tata usaha, pengelolaan kearsipan, serta penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana perkantoran; dan
- Penguatan layanan keamanan, ketertiban, serta fungsi kehumasan yang profesional, responsif, dan adaptif terhadap kebutuhan pemangku kepentingan.

b. Peningkatan Akses Masyarakat terhadap Hunian Layak dan Terjangkau di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, melalui strategi:

- Percepatan pembangunan rumah baru, baik rumah susun, rumah khusus, maupun rumah swadaya;
- Percepatan peningkatan kualitas rumah swadaya dan penyediaan sanitasi layak;
- Fasilitasi penyediaan lahan perumahan yang aman, legal, dan terjangkau;
- Penyediaan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) pada hunian tapak maupun hunian vertikal;
- Penyediaan fasilitas perumahan yang responsif gender, termasuk pencahayaan koridor yang memadai, ruang laktasi, taman bermain anak yang aman dan terpantau, serta aksesibilitas bagi penyandang disabilitas dan lanjut usia;
- Fasilitasi akses informasi hunian layak dan terjangkau melalui sosialisasi program perumahan yang melibatkan industri material, pengembang, dan lembaga perbankan.

c. Peningkatan Kualitas Permukiman Secara Terpadu di Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua Barat Daya, melalui strategi:

- Pendampingan dan penguatan kapasitas Pemerintah Daerah dalam penyusunan instrumen perencanaan kawasan permukiman terpadu, melalui sinkronisasi penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) daerah dengan program nasional;

- Penataan kawasan kumuh melalui pembangunan dan peningkatan infrastruktur kawasan permukiman, meliputi rumah, jalan lingkungan, drainase, air minum, sanitasi, pengelolaan persampahan, dan proteksi kebakaran;
 - Peningkatan kolaborasi antar pemangku kepentingan serta penguatan kelembagaan dalam penyelenggaraan perumahan;
 - Peningkatan kualitas pendataan serta pelaksanaan *monitoring* dan evaluasi bidang perumahan dan kawasan permukiman;
 - Pembinaan kepada pelaku usaha serta fasilitasi perlindungan konsumen perumahan;
 - Pemanfaatan inovasi teknologi konstruksi dan material guna mendukung percepatan penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);
 - Kolaborasi dengan Pemerintah Daerah dalam verifikasi dan penyediaan data BNBA (*by name by address*) pada program bantuan stimulan, pembangunan rumah susun, maupun penanganan kawasan kumuh, guna menjamin ketepatan sasaran, lokasi, dan manfaat.
- d. Penguatan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman, melalui strategi:
- Dukungan pembangunan dan penerapan Zona Integritas;
 - Penguatan penerapan Manajemen Risiko serta implementasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) dalam seluruh proses penyelenggaraan program.

III.3 Kerangka Kelembagaan



Gambar 5. Diagram SOTK UPT di Kementerian PKP

Sumber: PermenPKP Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman

Sebagaimana ditunjukkan pada struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) di atas, BP3KP memiliki beberapa unit kerja, yaitu Subbagian Umum dan Tata Usaha yang melaksanakan fungsi administrasi dan kesekretariatan, serta dua seksi teknis yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas teknis operasional di lapangan sesuai dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan. Selain itu, Jabatan Fungsional dan Jabatan Pelaksana berperan sebagai unsur pendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BP3KP, baik secara teknis maupun administratif, sesuai dengan kompetensi masing-masing. Kedua jabatan tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung operasionalisasi tugas sehari-hari, baik di lapangan maupun di kantor, yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan.

III.3.1 Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, BP3KP Papua II memiliki tugas melaksanakan kegiatan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pascabencana dan pascakerusuhan sosial, serta fasilitasi serah terima aset.

III.3.2 Fungsi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, UPT menyelenggarakan fungsi:

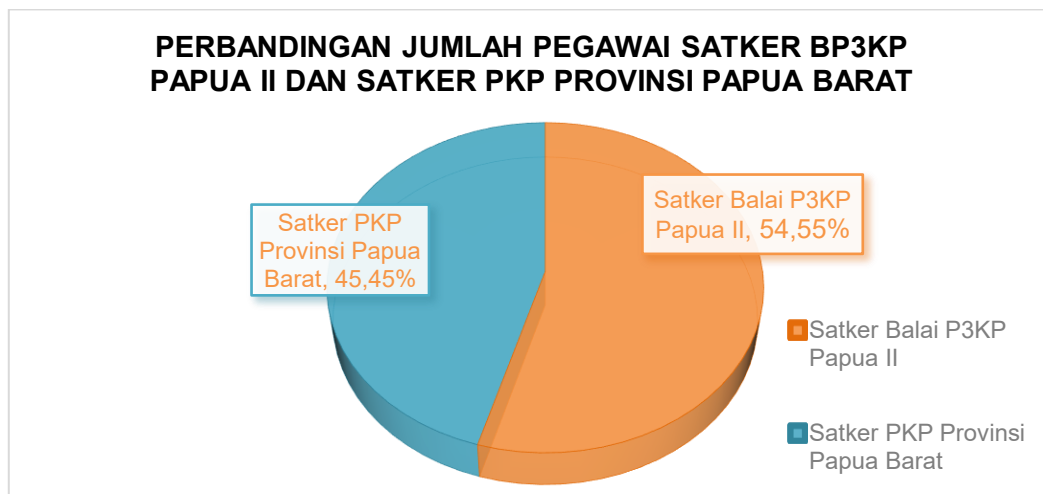
1. Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan.
2. Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
3. Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
4. Pelaksanaan dan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
6. Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
7. Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
8. Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
9. Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
10. Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
11. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan kawasan permukiman;
12. Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
13. Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;
14. Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko, serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
15. Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik, serta layanan hukum balai.

III.3.2 Jumlah dan Komposisi Pegawai Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

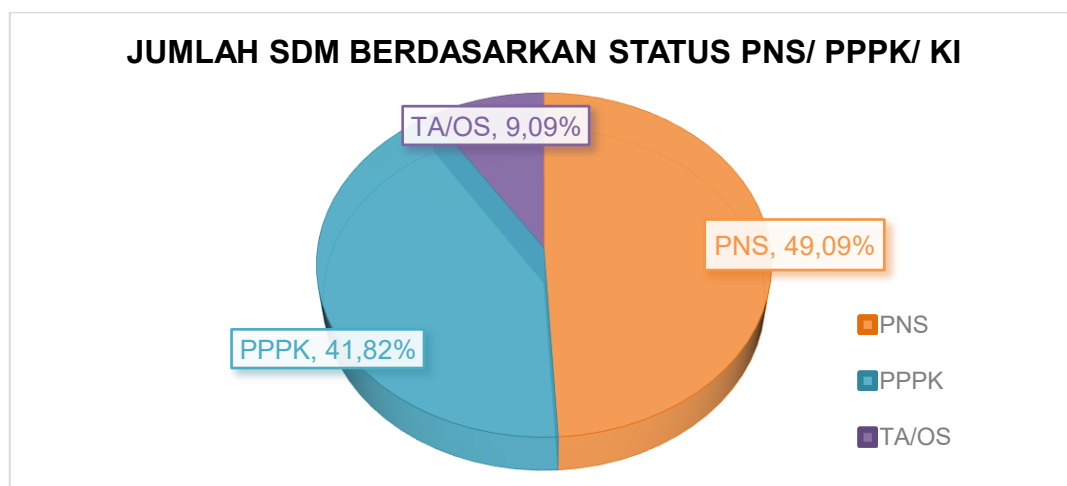
Berdasarkan status kepegawaian Aparatur Sipil Negara (ASN), jumlah pegawai pada BP3KP Papua II terdiri atas 26 (dua puluh enam) orang PNS, 24 (dua puluh empat) orang PPPK, 2 (dua) orang Tenaga Ahli (TA), dan 3 (tiga) orang *outsourcing*. Rincian komposisi pegawai berdasarkan kelompok status kepegawaian tersebut disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 4. Jumlah dan Komposisi Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian ASN

No	Unit Kerja	PNS	PPPK	TA/ Outsourcing	Jumlah Pegawai
1	Balai	13	14	3	30
2	Satker	13	10	2	25
Total Pegawai		26	24	5	55



Gambar 6. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025



Gambar 7. Perbandingan Jumlah Pegawai Satker BP3KP Papua II dan Satker PKP Provinsi Papua Barat Tahun 2025 Berdasarkan Status Kepegawaian

Komposisi sumber daya manusia (SDM) pada BP3KP Papua II terdiri atas berbagai latar belakang tingkat pendidikan. Pegawai dengan kualifikasi Pascasarjana (S-2) berjumlah 2 orang PNS dan 1 orang PPPK, tingkat Sarjana (S-1) sebanyak 25 orang PNS dan 16 orang PPPK, tingkat Diploma III (D-3) sebanyak 2 orang PPPK, serta tingkat SMA/SLTA sebanyak 4 orang PPPK. Rincian komposisi tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah Pegawai BP3KP Papua II Berdasarkan Satuan Kerja dan Pendidikan

No	Unit Kerja	PNS		SMA	PPPK			Jumlah Pegawai
		Sarjana/ S-1	Pascasarjana/ S-2		Diploma III/ D-3	Sarjana/ S-1	Pascasarjana/ S-2	
1	Balai	13	1	3	1	9	-	27
2	Satker	12	1	1	1	7	1	23
Total Pegawai		25	2	4	2	16	1	50

Pada BP3KP Papua II juga terdapat sejumlah jabatan yang memiliki peran dan tanggung jawab dalam mendukung pelaksanaan tugas serta penyelenggaraan setiap kegiatan di lingkungan Balai. Adapun jabatan-jabatan tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 6. Jumlah dan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Jabatan pada BP3KP Papua II

No	Jabatan Fungsional	Kebutuhan		Existing	
		Balai	Satker	Balai	Satker
1	Eselon III	-	-	1	-
2	Eselon IV	-	-	3	-
3	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	-	5	-	-
4	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	6	6	3	2
5	Arsiparis Ahli Muda	1	1	-	-
6	Arsiparis Ahli Pertama	2	4	2	2
7	Pranata Komputer Ahli Muda	-	1	-	-
8	Pranata Komputer Ahli Pertama	2	4	-	-
9	Pranata Komputer Terampil	1	-	-	-
10	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	1	-	1	-
11	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	2	-	-	-
12	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda	1	-	-	-
13	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	3	-	1	-
14	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	1	-	-	-
15	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	2	-	-
16	Penata Layanan Operasional	4	-	4	-
17	Pengelola Layanan Operasional	1	-	1	-
18	Operator Layanan Operasional	3	-	3	-
19	Pengelola Umum Operasional	1	-	1	-
20	Penata Kelola Perumahan Ahli Madya	-	2	-	-
21	Penata Kelola Perumahan Ahli Muda	4	5	-	2
22	Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama	8	10	4	7
23	Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Madya	-	2	-	-

No	Jabatan Fungsional	Kebutuhan		Existing	
		Balai	Satker	Balai	Satker
24	Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Muda	4	5	-	-
25	Penata Kelola Bangunan Gedung Kawasan Permukiman Ahli Pertama	11	10	7	7
26	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Muda	2	-	-	-
27	Analisis Pembiayaan Infrastruktur Pertama	4	-	-	-
Total		62	57	31	20

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Target Kinerja Tahun 2025–2029 pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II dibagi ke dalam 5 (lima) kelompok sesuai dengan jumlah Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), yaitu meliputi: Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko.

Dalam hal ini, target kinerja dikelompokkan berdasarkan program dan kegiatan yang dilaksanakan, dengan satuan output yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing sasaran kegiatan. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang terstruktur dan terukur terhadap kontribusi setiap program dalam mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi. Adapun beberapa kegiatan yang menjadi bagian dari intervensi BP3KP Papua II antara lain sebagai berikut:

A. Program: Perumahan dan Kawasan Permukiman

1. Penyelenggaraan Sistem dan Strategi;
2. Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum;
3. Penyediaan Rumah Layak Huni;
4. Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan;
5. Penanganan Permukiman Kumuh;
6. Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman;

B. Program: Dukungan Manajemen

1. Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II

Tabel 7. Target Kinerja BP3KP Papua II Tahun 2025–2029

KEGIATAN / SASARAN / RINCIAN OUTPUT	ANGGARAN 2025-2029
Meningkatnya Hunian Layak	
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	
Rekomendasi Kebijakan	13 Rekomendasi Kebijakan
Data dan Informasi	8 Dokumen
Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	23 Laporan
Kegiatan	1 Kegiatan
Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	
Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	334 Unit
Dukungan Teknis	11 Dokumen
Kebijakan Program Anggaran dan Rencana Teknis	4 Rekomendasi Kebijakan
Penyediaan Rumah Layak Huni	
Pembangunan Rumah Swadaya	36.623 Unit
Pembangunan Rumah Susun	440 Unit
Pembangunan Rumah Khusus	8.120 Unit
Pelaporan dan Dokumen Teknis	14 Laporan
Rekomendasi kebijakan penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	12 Rekomendasi Kebijakan
Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	
Kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan	4 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh	
Penanganan Permukiman Kumuh	55 Hektar
Meningkatnya Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	
Pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	4 Laporan
Pembangunan dan Penerapan Zona Integritas	5 Rekomendasi Kebijakan
Penerapan Manajemen Risiko dan Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)	9 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	
Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	
Layanan Perkantoran	10 Layanan
Layanan Umum	34 Layanan
Layanan Sarana Internal	10 Layanan
Layanan Data dan Informasi	12 Layanan
Layanan BMN	8 Layanan
Layanan Reformasi Kinerja	8 Layanan

IV.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai sasaran strategis bidang perumahan dan kawasan permukiman Tahun 2025–2029 yang dilaksanakan oleh BP3KP Papua II, diperlukan dukungan pendanaan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN) dengan total indikatif sebesar **Rp. 6.009.522.302.330,- (Enam Triliun Sembilan Miliar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Tiga Ratus Dua Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Rupiah.)** Indikasi kebutuhan anggaran tersebut dialokasikan untuk penyelenggaraan program perumahan dan kawasan permukiman serta program dukungan manajemen guna mencapai target pembangunan yang telah ditetapkan, sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini. Adapun rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk setiap kegiatan diuraikan lebih lanjut dalam matriks kinerja dan pendanaan sebagaimana tercantum dalam lampiran.

Tabel 8. Rekapitulasi Kerangka Pendanaan BP3KP Papua II

No	Kegiatan	Anggaran 2025-2029 (Rp Ribu)
1	Penyelenggaraan Sistem dan Strategi	10.161.923,76
2	Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum	13.277.198,67
3	Penyediaan Rumah Layak Huni	5.541.436.958,74
4	Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan	346.865,72
5	Penanganan Permukiman Kumuh	126.275.000,00
6	Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.590.491,00
7	Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	314.433.864,45
Total		6.009.522.302,33

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP) Papua II Tahun Anggaran 2025–2029 disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), khususnya Renstra Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, serta Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen ini menjadi pedoman dalam mendukung kebijakan pengembangan sektor perumahan melalui **Program Tiga Juta Rumah**, yang berfokus pada peningkatan akses masyarakat terhadap hunian yang layak dan terjangkau, baik melalui pembangunan rumah baru maupun peningkatan kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) secara kolaboratif.

Dalam rangka mendukung penyelenggaraan kebijakan perumahan tersebut, diperlukan koordinasi, konsolidasi, dan sinergi yang kuat antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya. Kolaborasi tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan pemanfaatan seluruh sumber daya yang tersedia sehingga kinerja pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai secara maksimal, sekaligus meningkatkan ketersediaan serta kualitas pelayanan infrastruktur yang lebih merata, terjangkau, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pencapaian target Rencana Strategis BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025–2029 memerlukan dukungan pendanaan yang memadai. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kemitraan antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, termasuk melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Upaya ini diarahkan untuk mengembangkan berbagai alternatif pembiayaan pembangunan perumahan guna mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), melalui penyediaan rumah layak huni yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum (PSU) yang memadai, peningkatan kualitas perumahan, serta kepastian hukum dalam bermukim.

Pelaksanaan Rencana Strategis BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025–2029 dilaksanakan dengan menerapkan prinsip pembangunan yang berkelanjutan, transparan, dan akuntabel. Untuk memastikan ketercapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan, diperlukan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui pengukuran capaian indikator kinerja program dan kegiatan, penyusunan laporan kinerja, serta evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan kegiatan dan pemanfaatan anggaran sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan. Hasil pemantauan dan evaluasi tersebut selanjutnya digunakan sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Dengan demikian, Rencana Strategis BP3KP Papua II Tahun Anggaran 2025–2029 menjadi acuan bagi balai dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara terarah, terukur, dan terintegrasi. Dokumen ini juga bersifat dinamis dan terbuka terhadap penyempurnaan secara berkelanjutan agar tetap relevan dan responsif terhadap dinamika lingkungan strategis, sejalan dengan prinsip perencanaan pembangunan nasional yang sistematis, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

LAMPIRAN

Lampiran 1 Matriks Kinerja dan Pendanaan

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	ANGGARAN (Rp Ribu)				2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15		
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																	
SASARAN STRATEGIS: Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan																	
INDIKATOR SASARAN STRATEGIS:																	
1	Persentase jumlah rumah tangga dengan akses hunian layak dan terjangkau yang difasilitasi																
SASARAN PROGRAM:																	
Meningkatnya Hunian Layak																	
KEGIATAN: Penyelenggaraan Sistem dan Strategi																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
1	Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	50.000,00	200.000,00	210.800,00	222.183,20	234.181,09	917.164,29		
2	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	70.000,00	73.780,00	77.764,12	81.963,38	303.507,50		
3	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja	Laporan		2	0	0	0	0	2	107.316,55	-	-	-	-	107.317		
4	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	32.631,58	34.393,68	36.250,94	38.208,49	141.484,70		
5	Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Kegiatan		1	-	-	-	-	-	423.425,00	-	-	-	-	-		
6	Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	536.244,00	565.201,18	595.722,04	627.891,03	2.325.058,25		
7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	241.788,00	254.844,55	268.606,16	283.110,89	1.048.349,60		
8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Laporan		1	2	2	2	2	9	204.742,00	789.546,00	832.181,48	877.119,28	924.483,73	3.628.072,49		
9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	175.000,00	184.450,00	194.410,30	204.908,46	758.768,76		
10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan	Laporan		-	2	2	2	2	8	-	215.000,00	226.610,00	238.846,94	251.744,67	932.201,61		
KEGIATAN: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum	Unit		50	71	71	71	71	334	3.550.000,00	1.040.642,34	1.082.102,19	1.131.854,02	1.198.189,78	8.002.788,32		
2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal	Unit		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU	Dokumen		-	-	1	1	1	3	-	-	89.078,00	93.888,21	98.958,18	281.924,39		
4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	966.451,00	1.018.639,35	1.073.645,88	1.131.622,76	4.190.358,99		
5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan	Dokumen		-	1	1	1	1	4	-	90.000,00	94.860,00	99.982,44	105.381,49	390.223,93		
6	Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	95.000,00	100.130,00	105.537,02	111.236,02	411.903,04		
KEGIATAN: Penyediaan Rumah Layak Huni																	
SASARAN KEGIATAN:																	
Meningkatnya ketersediaan rumah layak huni																	
OUTPUT KEGIATAN:																	
1	Jumlah unit rumah swadaya	Unit		411	9053	9053	9053	9053	36623	13.974.000,00	219.150.497,50	230.081.995,00	241.013.492,50	251.944.990,00	956.164.975,00		
2	Jumlah rumah khusus yang terbangun	Unit		-	2030	2030	2030	2030	8120	-	874.817.589,58	901.018.792,62	943.827.377,79	986.635.962,96	3.706.299.722,94		
3	Jumlah rumah susun yang terbangun	Unit		88	88	88	88	88	440	176.000.000,00	165.662.183,97	167.050.400,00	174.627.200,00	182.204.000,00	865.543.783,97		
4	Jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	88.750,00	93.542,50	98.593,80	103.917,86	384.804,15		
5	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh	Laporan		2	-	-	-	-	2	12.742,82	-	-	-	-	12.742,82		
6	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	585.232,00	616.834,53	650.143,59	685.251,35	2.537.461,47		
7	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	371.580,00	391.645,32	412.794,17	435.085,05	1.611.104,54		
8	Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	1.425.000,00	1.501.950,00	1.583.055,30	1.668.540,29	6.178.545,59		
9	Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Laporan		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

PROGRAM/ KEGIATAN			SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET					ANGGARAN (Rp Ribu)						
						2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1			-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
		10	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	95.000,00	100.130,00	105.537,02	111.236,02	411.903,04
		11	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	528.600,00	557.144,40	587.230,20	618.940,63	2.291.915,23
			KEGIATAN: Penyelenggaraan Pembiayaan Perumahan														
			SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya Akses Rumah Tangga yang Terfasilitasi Pembiayaan Perumahan														
			OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembiayaan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	80.000,00	84.320,00	88.873,28	93.672,44	346.865,72
			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
2			Persentase luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Penanganan Permukiman Kumuh														
			KEGIATAN: Penanganan Permukiman Kumuh														
			SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya luasan permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu														
			OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Luas permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu	Hektar		-	15	-	20	20	55	-	31.575.000,00	-	46.300.000,00	48.400.000,00	126.275.000,00
			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
3			Persentase terwujudnya ekosistem perumahan dan permukiman yang mendukung tersedianya hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan														
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya tata kelola dan pengendalian risiko penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
			KEGIATAN: Penyelenggaraan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan tata kelola dan pengendalian risiko perumahan dan kawasan permukiman														
			OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah laporan pemantauan dan pendampingan tata kelola dan pengendalian risiko	Laporan		-	1	1	1	1	4	-	53.200,00	75.000,00	100.000,00	125.000,00	353.200,00
			SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel														
			OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah pembangunan dan penerapan zona integritas	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	129.232,00	182.150,00	200.365,00	220.410,00	242.451,00	974.608,00
			SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman														
			OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Rekomendasi Kebijakan		1	1	1	1	1	5	174.233,00	225.000,00	247.500,00	272.250,00	299.475,00	1.218.458,00
		2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Rekomendasi Kebijakan		-	1	1	1	1	4	-	225.000,00	247.500,00	272.250,00	299.475,00	1.044.225,00
			SASARAN STRATEGIS 2: Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS														
1			Tingkat kualitas tata kelola Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman														
			SASARAN PROGRAM: Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II														
			KEGIATAN: Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II														
			SASARAN KEGIATAN: Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II														
			OUTPUT KEGIATAN:														
		1	Jumlah Layanan Perkantoran (Sekretariat Jenderal)	Layanan		2	2	2	2	2	10	23.911.214,80	65.459.559,07	68.732.537,03	72.169.163,88	75.777.622,07	306.050.096,85
		2	Jumlah Layanan Umum (Sekretariat Jenderal)	Layanan		2	2	2	2	2	10	39.071,57	127.800,00	134.190,00	140.899,50	147.944,48	589.905,54
		3	Jumlah Layanan Umum (Ditjen KP)	Layanan		-	2	2	2	2	8	-	281.000,00	296.174,00	312.167,40	329.024,44	1.218.365,83
		4	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	2	2	2	2	8	-	264.711,00	279.005,39	294.071,69	309.951,56	1.147.739,64
		5	Jumlah Layanan Umum (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	2	2	2	2	8	-	205.000,00	216.070,00	227.737,78	240.035,62	888.843,40
		6	Jumlah Layanan Sarana Internal (Sekretariat Jenderal)	Layanan		2	2	2	2	2	10	56.309,23	596.189,79	625.999,28	657.299,25	690.164,21	2.625.961,77
		7	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	23.100,00	24.347,40	25.662,16	27.047,92	100.157,48

PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN PROGRAM (OUTCOME)/SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)/INDIKATOR	SATUAN	INDIKASI LOKASI	TARGET						ANGGARAN (Rp Ribu)					
				2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL	2025	2026	2027	2028	2029	TOTAL
-1	-2	-3		-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12	-13	-14	-15
8	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	15.597,00	16.439,24	17.326,96	18.262,61	67.625,81
9	Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	80.000,00	84.320,00	88.873,28	93.672,44	346.865,72
10	Jumlah Layanan BMN (Ditjen KP)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	42.500,00	44.795,00	47.213,93	49.763,48	184.272,41
11	Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	1	1	1	1	4	-	80.000,00	84.320,00	88.873,28	93.672,44	346.865,72
12	Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Layanan		-	2	2	2	2	8	-	200.000,00	210.800,00	222.183,20	234.181,09	867.164,29

Lampiran 2 Metode Perhitungan

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PROGRAM: PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					
SASARAN STRATEGIS 1:					
Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman Yang Efisien, Layak, dan Terjangkau, dan Berkelanjutan					
SASARAN PROGRAM 1:					
Meningkatnya Hunian Layak					
Kegiatan 1:					
Penyelenggaraan Sistem dan Strategi					
SK 1 Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam pembangunan perumahan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	IKSK 1 Tingkat kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam mendukung penyediaan rumah layak huni	OK 1 Jumlah laporan penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan teknis penyelenggaraan klinik perumahan dan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 5 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
		OK 2 Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2026: 1 dokumen 2027: 1 dokumen 2028: 1 dokumen 2029: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
		OK 3 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman dan Akuntabilitas Kinerja	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan tematik penyelenggaraan kawasan permukiman dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2026: 0 laporan 2027: 0 laporan 2028: 0 laporan 2029: 0 laporan Total: 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 4 Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2026: 1 laporan 2027: 1 laporan 2028: 1 laporan 2029: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
		OK 5 Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah kegiatan koordinasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 kegiatan 2026: 0 kegiatan 2027: 0 kegiatan 2028: 0 kegiatan 2029: 0 kegiatan Total: 1 kegiatan	Non Kumulatif	Internal
		OK 6 Jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan dokumen kebijakan, kemitraan, strategi, dan program prioritas penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN	OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		
		OK 7	Jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi dokumen data dan informasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal		
		OK 8	Jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi laporan kegiatan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total: 9 laporan	Non Kumulatif	Internal		
		OK 9	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan, strategi, pemrograman, anggaran dan kemitraan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal		
		OK 10	Jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 2 laporan 2029: 2 laporan 2026: 2 laporan 2028: 2 laporan Total: 8 laporan	Non Kumulatif	Internal		
		Kegiatan 2: Penyelenggaraan Penyiapan Lahan dan Prasarana, Sarana, Utilitas Umum					
SK 1	Meningkatnya akses penyiapan lahan, perizinan dan penghunian perumahan di Balai ...	IKSK 1	Persentase rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana dan utilitas umum	OK 1	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DiPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i> Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 50 unit 2027: 71 unit 2029: 71 unit 2026: 71 unit 2028: 71 unit Total: 334 unit	Non Kumulatif	Internal
				OK 2	Jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal <i>(Pendanaan dilaksanakan melalui DiPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)</i> Dihitung dari realisasi jumlah rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rumah yang mendapat pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum hunian vertikal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 0 unit 2029: 0 unit 2026: 0 unit 2028: 0 unit Total: 0 unit	Non Kumulatif	Internal
		IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi penyiapan lahan serta PSU	OK 3	Jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi dokumen teknis penyiapan lahan dan PSU di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 0 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 3 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 4	Jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penyiapan lahan dan perizinan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen	Non Kumulatif	Internal
				OK 5	Jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan Dihitung dari realisasi jumlah dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi dokumen dukungan teknis penghunian perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN	METODE PERHITUNGAN	TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)
				Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 dokumen 2027: 1 dokumen 2029: 1 dokumen 2026: 1 dokumen 2028: 1 dokumen Total: 4 dokumen		
			OK 6 Jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan program, anggaran, dan rencana teknis penyiapan lahan, perizinan dan penghunian di bidang perumahan perkotaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
Kegiatan 3: Penyediaan Rumah Layak Huni						
SK 1 Meningkatnya ketersediaan layak huni	IKSK 1	Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui peningkatan kualitas	OK 1 Jumlah unit rumah swadaya (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah unit rumah swadaya oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi jumlah unit rumah swadaya di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 411 unit 2027: 9.053 unit 2029: 9.053 unit 2026: 9.053 unit 2028: 9.053 unit Total: 36.623 unit	Non Kumulatif	Internal
		Persentase peningkatan ketersediaan rumah layak huni melalui pembangunan baru	OK 2 Jumlah rumah khusus yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah khusus yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 unit 2027: 2.030 unit 2029: 2.030 unit 2026: 2.030 unit 2028: 2.030 unit Total: 8.120 unit	Non Kumulatif	Internal
			OK 3 Jumlah rumah susun yang terbangun (Pendanaan dilaksanakan melalui DIPA Ditjen KP, Ditjen Perumahan Perdesaan, dan Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah rumah susun yang terbangun oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi jumlah rumah susun yang terbangun di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 88 unit 2027: 88 unit 2029: 88 unit 2026: 88 unit 2028: 88 unit Total: 440 unit	Non Kumulatif	Internal
	IKSK 3	Tingkat kinerja perencanaan, pemrograman, dan fasilitasi peningkatan kualitas rumah dan pengembangan kawasan permukiman	OK 4 Jumlah Dokumen Teknis Penyiapan Penanganan Kumuh dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Dihitung dari realisasi jumlah dokumen teknis penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi laporan penyiapan penanganan kumuh dan pengembangan kawasan permukiman di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 5 Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pembangunan rusun, peningkatan kualitas dan penanganan kumuh di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 laporan 2027: 0 laporan 2029: 0 laporan 2026: 0 laporan 2028: 0 laporan Total: 2 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 6 Jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan	Non Kumulatif	Internal
			OK 7 Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi rekomendasi kebijakan penyelenggaraan pembangunan perumahan perdesaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 rekomendasi kebijakan 2027: 1 rekomendasi kebijakan 2029: 1 rekomendasi kebijakan 2026: 1 rekomendasi kebijakan 2028: 1 rekomendasi kebijakan Total: 4 rekomendasi kebijakan	Non Kumulatif	Internal
			OK 8 Jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan	Dihitung dari realisasi jumlah laporan kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perdesaan oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	Non Kumulatif	Internal

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN		INDIKATOR KINERJA / SATUAN		OUTPUT KEGIATAN		METODE PERHITUNGAN			TIPE PERHITUNGAN	SUMBER DATA
(1)		(2)		(3)		(4)			(5)	(6)
			permukiman yang efektif dan akuntabel			Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 5 laporan				
SK 3	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	IKSK 3	Tingkat dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	OK 1	Jumlah penerapan manajemen risiko	Dihitung dari realisasi jumlah penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan penerapan Manajemen Risiko di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II				
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 1 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 5 laporan				
				OK 2	Jumlah Pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan	Dihitung dari realisasi jumlah pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Realisasi rekomendasi kebijakan pelaksanaan Sistem Manajemen Anti Penyipuan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II				
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 laporan 2027: 1 laporan 2029: 1 laporan 2026: 1 laporan 2028: 1 laporan Total: 4 laporan				
PROGRAM: DUKUNGAN MANAJEMEN										
SASARAN STRATEGIS 2:										
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman										
SASARAN PROGRAM 1:										
Meningkatnya Kualitas Dukungan Manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II										
Kegiatan 1:										
Dukungan Manajemen Balai ...										
SK 1	Meningkatnya layanan dukungan manajemen Balai ...	IKSK 1	Tingkat layanan dukungan manajemen Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II	OK 1	Jumlah Layanan Perkantoran <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan perkantoran oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Jumlah realisasi layanan perkantoran di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II				
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 10 layanan				
				OK 2	Jumlah Layanan Umum <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal
						Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II				
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 10 layanan				
				OK 3	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal
		Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II								
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan				
OK 4	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perdesaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal				
		Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II								
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan				
OK 5	Jumlah Layanan Umum <i>(Ditjen Perumahan Perkotaan)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan umum oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal				
		Capaian = Jumlah realisasi layanan umum di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II								
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan				
OK 6	Jumlah Layanan Sarana Internal <i>(Sekretariat Jenderal)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan sarana internal oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal				
		Capaian = Jumlah realisasi layanan sarana internal di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II								
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 2 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 10 layanan				
OK 7	Jumlah Layanan Data dan Informasi <i>(Ditjen Kawasan Permukiman)</i>	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II			Non Kumulatif	Internal				
		Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II								
						Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan				

SASARAN STRATEGIS/SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN (1)	INDIKATOR KINERJA / SATUAN (2)	OUTPUT KEGIATAN (3)	METODE PERHITUNGAN (4)	TIPE PERHITUNGAN (5)	SUMBER DATA (6)
		OK 8 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perdesaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 9 Jumlah Layanan Data dan Informasi (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan data dan informasi oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi layanan data dan informasi di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 10 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Kawasan Permukiman)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 11 Jumlah Layanan BMN (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan BMN oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi layanan BMN di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 1 layanan 2029: 1 layanan 2026: 1 layanan 2028: 1 layanan Total: 4 layanan	Non Kumulatif	Internal
		OK 12 Jumlah Layanan Reformasi Kinerja (Ditjen Perumahan Perkotaan)	Dihitung dari realisasi jumlah layanan reformasi kinerja oleh Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Capaian = Jumlah realisasi layanan reformasi kinerja di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Papua II Target output per tahun sebagai berikut: 2025: 0 layanan 2027: 2 layanan 2029: 2 layanan 2026: 2 layanan 2028: 2 layanan Total: 8 layanan	Non Kumulatif	Internal



KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

RENCANA STRATEGIS
BP3KP PAPUA II
2025-2029